

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Situasi ekonomi saat ini yang sulit diprediksi menyebabkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan bisnis. Tidak jarang perusahaan besar tanpa diduga mengalami kebangkrutan bisnis mulai dari perusahaan besar di Indonesia seperti Batavia Air dan beberapa perusahaan milik konglomerat Bakrie sampai dengan perusahaan besar dunia seperti WorldCom, Washington Mutual Bank hingga Lehman Brothers.

Kebangkrutan yang dialami perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terlilit hutang, ekspansi yang berlebihan, penipuan yang dilakukan pihak manajemen bersama CEO dan masih banyak lagi. Terdapat pelajaran yang bisa dipetik akibat bangkrutnya perusahaan ini. Pertama, kasus perusahaan maskapai besar, Batavia Air yang mengumumkan bahwa maskapai resmi tutup/pailit di tahun 2003 akibat memiliki utang mencapai Rp 2,5 triliun. Batavia Air menyewa pesawat Airbus dari *International Lease Finance Corporation (ILFC)* yang baru diungkapkan setelah mereka menyatakan tidak bisa membayar utang (Noviansyah, 2013).

Kedua, kasus kebangkrutan yang dialami oleh beberapa perusahaan milik konglomerat bakrie. Setidaknya terdapat empat perusahaan milik konglomerat Bakrie yang digugat pailit oleh pemberi pinjaman:

**Tabel 1.1**

**Empat Perusahaan Bakrie yang Pailit**

<b>Nama perusahaan (tahun pailit)</b>	<b>Penyebab pailit</b>
Bakrie Finance Corp (2002)	PT Bakrie Finance Corp. (BFC) Tbk digugat pailit wali amanat Bank Mandiri di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Total utang pokok dan bunga obligasi yang tidak dilaporkan senilai Rp200 miliar yang jatuh tempo pada 29 Juni 2001.
Bakrie Life (2008)	Bakrie Life mengalami gagal bayar dana nasabah senilai Rp 360 miliar. Akibatnya, Bakrie life kekurangan likuiditas.
PT Bakrie Swasakti Utama (2013)	PT Bakrie Swasakti Utama (BSU), digugat pailit akibat salah satu pembeli, Soetomo membeberkan BSU tidak membayar kewajiban ganti rugi sekitar Rp 3,5 miliar.
Bakrieland Development (2014)	Bakrieland digugat oleh The Bank of New York Mellon cabang London terhadap anak usaha Bakrieland yakni BLD Investment Pte yang memiliki utang USD 155 juta. Bakrieland dituntut atas informasi yang tidak diungkapkan berkaitan dengan kasus ini.

Sumber: Pratomo, 2013

Ketiga, Washington Mutual Bank yang juga runtuh begitu saja tahun 2008 lalu akibat keserakahan pihak dewan komisaris yang melakukan penarikan US\$ 16 miliar dan tidak diungkapkan sehingga kesulitan menemukan modal baru (Joe, 2008). Keempat, penipuan yang dilakukan CEO WorldCom, Bernard Ebbers sehingga *asset* perusahaan senilai US\$ 103,9 miliar raib Nyatanya, kasus penipuan serupa juga dialami oleh CEO Bank Investasi Lehman. Laporan kepailitan mengungkapkan berbagai skandal antara para pejabat Lehman dan auditornya Ernst & Young yang telah bekerja sama melakukan penipuan (Tim Penyusun Koran SINDO, 2016).

Dari berbagai fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama pemegang saham mengalami kerugian akibat perusahaan mengalami kebangkrutan bisnis adalah kurangnya informasi perusahaan yang diungkapkan berkaitan dengan kegiatan perusahaan serta lemahnya sistem manajemen perusahaan. Yaseen, et al. (2013: 25) menyatakan bahwa ancaman-ancaman kebangkrutan bisnis tersebut menekan komite tata kelola perusahaan dan organisasi-organisasi di seluruh dunia untuk menyediakan informasi dalam sejumlah laporan dan menetapkan aturan-aturan yang dapat membantu dalam pemantauan dan pengawasan sistem manajemen perusahaan. Komite tata kelola perusahaan dan organisasi-organisasi ini mulai membuat aturan untuk mengatasi ancaman kegagalan dan kebangkrutan dengan cara memantau perusahaan *go public* agar menyediakan informasi tambahan yang memadai.

Pengungkapan informasi yang memadai merupakan hal yang penting karena tanpa informasi tersebut, pemegang saham tidak dapat menilai risiko dan peluang secara tepat. Pemegang saham meminta informasi tambahan untuk membantu dalam membuat keputusan-keputusan investasi akibat adanya unsur-unsur ketidakpastian tentang kualitas perusahaan dalam hal aset atau risiko arus kas dan surat-surat berharga. Pengungkapan informasi tambahan tersebut akan membantu pemegang saham mengurangi kemungkinan kesalahan dalam membuat keputusan investasi. Selain itu, perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi tambahan yang lebih ke publik akan diberikan apresiasi positif oleh pemegang saham karena dengan hal ini dapat memberikan nilai positif

dibandingkan perusahaan yang tidak menyediakan informasi tambahan dalam laporan tahunan.

Menurut Sudarmadji (2007: 55), laporan tahunan adalah laporan yang diterbitkan setahun sekali yang berisi informasi keuangan dan data informasi non-keuangan. Pengungkapan informasi yang dimuat dalam laporan tahunan terpublikasi, yakni laporan tahunan dengan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan laporan tahunan dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* adalah pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi dan peraturan yang berlaku, sedangkan *voluntary disclosure* adalah pengungkapan yang bebas dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan tahunan.

*Mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* merupakan cara yang terbaik untuk mempublikasikan informasi terkait dengan kondisi perusahaan pada waktu tertentu kepada para pemegang saham. *Voluntary disclosure* digunakan untuk memberikan kebutuhan informasi yang lebih kepada para pengguna pemegang saham dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan *voluntary disclosure* yang memadai untuk kepentingan pemegang saham dan perusahaan, peran manajemen sangat penting karena *voluntary disclosure* dalam laporan tahunan diungkapkan oleh akuntan perusahaan dengan persetujuan manajemen puncak perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki sistem *corporate governance* yang baik, maka kualitas *voluntary disclosure* perusahaan menjadi lebih baik.

Sigit (2012: 139) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, serta para pemegang internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka untuk mengendalikan perusahaan.

Agoes (2009: 109) menyatakan terdapat 4 organ khusus dalam penerapan *corporate governance* yang selanjutnya dikenal dengan istilah mekanisme *corporate governance*, yaitu komisaris independen, direktur independen, komite audit dan sekretaris perusahaan. Pengertian mekanisme *good corporate governance* tidak hanya sebatas definisi diatas, namun juga harus memenuhi prinsip-prinsipnya. Prinsip *good corporate governance* berupa *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*. Berdasarkan pernyataan ini, pertama-tama perusahaan harus terbuka terhadap informasi. Setiap komponen perusahaan seperti komisaris, direksi, dan komite audit dituntut untuk mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggungjawabnya agar setiap komponen tersebut mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.

Dalam hal ini, direksi harus memiliki sistem dan pengawasan di luar organ internal yang mengawasi bidang keuangan, operasional, *risk management* dan kepatuhan. Keseluruhan tugas ini menjadi tanggungjawab komite audit. Dari pernyataan diatas, maka dapat didefinisikan mekanisme *corporate governance* menjadi suatu hubungan antara beberapa organ terkait, seperti: proporsi dewan komisaris yang independen, proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan

akuntansi atau bisnis, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite audit yang independen dan jumlah rapat komite audit.

Dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis adalah salah satu variabel yang jarang diangkat dalam penelitian sebelumnya terkait mekanisme *corporate governance*. Item ini disimpulkan dengan melihat pedoman *good corporate governance* Indonesia tahun 2006 tentang kemampuan dan integritas anggota dewan komisaris yang menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris harus memiliki syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.

Yaseen, et al. (2013) melakukan penelitian serupa dan menemukan bahwa variabel dewan komisaris independen, ukuran dewan, kualitas auditor dan ukuran perusahaan mempunyai hubungan yang signifikan positif terhadap *voluntary disclosure* sedangkan proporsi dewan yang memiliki hubungan keluarga, anggota komite audit independen tidak berhubungan signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2012) yang menemukan bahwa keseluruhan variabel independen yang berupa proporsi kepemilikan manajerial, proporsi kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Dari perbedaan pendapat pada penelitian-penelitian sebelumnya dan perlunya perluasan penelitian yang didukung oleh uraian di atas, maka diajukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh**

## **Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap *Voluntary Disclosure* Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah proporsi dewan komisaris yang independen berpengaruh terhadap *voluntary disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis berpengaruh terhadap *voluntary disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *voluntary disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah proporsi komite audit yang independen berpengaruh terhadap *voluntary disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap *voluntary disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh antara proporsi dewan komisaris yang independen dengan *voluntary disclosure*.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh antara dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis dengan *voluntary disclosure*.
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh antara jumlah rapat dewan komisaris dengan *voluntary disclosure*.
4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh antara komite auditor dengan *voluntary disclosure*.
5. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh antara jumlah rapat komite audit dengan *voluntary disclosure*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dan informasi yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa:

1. Kontribusi praktis
  - a. Bagi pemegang saham

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam investasi sehingga pemegang saham dapat menilai tingkat *voluntary disclosure* yang dilakukan perusahaan melalui mekanisme *corporate governance* suatu perusahaan.

- b. Bagi badan pembuat standar dan pemerintah

Menyediakan bukti empiris mengenai perilaku *voluntary disclosure* perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga dapat



menjadi masukan bagi badan pembuat standar dan pemerintah selaku regulator (BAPEPAM, IAI, KNKG, dan sebagainya) dalam meningkatkan keefektifan pengawasan mekanisme *corporate governance* di Indonesia, serta meningkatkan kualitas transparansi perusahaan publik.

## 2. Kontribusi teoritis

Bagi bidang akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan meningkatkan perkembangan terhadap teori-teori berkaitan dengan hubungan antara mekanisme *corporate governance* terhadap *voluntary disclosure*.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca mengetahui isi dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang dibahas, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep yang relevan dan menjadi dasar dari pengembangan kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis, serta akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, variabel yang digunakan dalam penelitian, pengukuran variabel, model penelitian serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil analisis data dan interpretasi hasil.

### BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat diberikan peneliti tentang penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil penelitian.